

The book cover features a complex design. The top half has a background of abstract, colorful brushstrokes in shades of white, yellow, orange, and red. Overlaid on this is a large, intricate geometric pattern of interlocking lines in blue, white, and red. The bottom half of the cover is a solid dark red color, also featuring a faint, repeating geometric pattern. The title is prominently displayed in the center, and the author's name is at the bottom.

# **FIQH ZAKAT DAN WAKAF**

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**



**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**© Hak cipta pada pengarang**

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : FIQH ZAKAT DAN WAKAF  
Penulis : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.  
Cetakan Pertama : Maret 2018  
Cetakan kedua : Februari 2019  
Desain Cover : Tim Permata Percetakan  
Layout oleh : Tim Permata Percetakan

---

**Percetakan Permata**  
Jl. Pondok Permata Biru  
Blok B20 No. 2-3, Sukarame  
Bandar Lampung

---

**ISBN** :

---

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini dapat diselesaikan atas inayah dan hidayah dari Allah SWT, dan berkat bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kiranya para pembaca berkenan memberi sumbang saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bandar lampung, 2019  
Penyusun,

Dr. H.Khoirul Abror, MH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I ZAKAT</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Zakat .....	1
B. Perbedaan Zakat dengan Pajak .....	7
C. Wajib Zakat .....	11
D. Mustahik Zakat .....	13
E. Harta yang Wajib Dizakatkan .....	24
F. Kekayaan Terpendam dan Tambang .....	36
G. Hikmah dan Fungsi Sosial Zakat .....	37
H. Pengelolaan dan Penggunaan Zakat .....	42
<b>BAB II WAKAF</b> .....	<b>51</b>
A. Wakaf Menurut Hukum Islam .....	51
1. Pendahuluan .....	51
2. Sejarah Wakaf .....	56
3. Pengertian Wakaf .....	58
4. Dasar Hukum Wakaf .....	62
5. Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf .....	66
6. Nazir (Pengurus Wakaf) .....	67
7. Macam-Macam Wakaf .....	69



8. Kedudukan dan Perubahan Wakaf.....	74
B. Wakaf Menurut KHI .....	82
1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	82
2. Perwakafan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	85
C. Wakaf Sebagai Fungsi Sosial .....	90
D. Hubungan Taharah dengan Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan .....	35

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIODATA PENYUSUN**

# BAB I

## ZAKAT

### A. Pengertian Zakat

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kuantitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagai mana diisyaratkan dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2): 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

Zakat juga berarti ‘penyucian’ dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh AL-Qur’an dilarang memakainya.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman : (QS Al-Baqarah (2):188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil”

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud syaltut, seorang ulama kontemporer

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Filsafah Ibadah dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Putra, jakarta, 1992), h. 187.



dari Mesir, mendefinisikanya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>2</sup>

Beberapa pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat Memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan. Informasi yang ditemukan di dalam kitab *al-mu'jam al-mufahras li al-faz*

Al-Qur'an oleh Abdul Baqi, bahwa persoalan zakat salah satu yang mendapat perhatian besar dalam Islam sehingga al-qur'an menyebut kata "zakat" sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat.<sup>3</sup> Sebagai isyarat bahwa kedua hal itu mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam.

Al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat yaitu:

1. Al-zakat (zakat) seperti terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *al-'ibadah fi al-islam*, (Muassasah al-Risalah, Mesir, 1979), h. 235.

<sup>3</sup> Muhammad Farid Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufharas Li Al-Faz Al-Qura'an*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1987), h. 331-332.

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”

2. Al-Sadaqah (sedekah) seperti yang ditemukan QS. at-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Al-Nafaqah (infak) seperti yang ditemukan pada QS. at-Taubah (9): 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

4. Al-Haq (hak) seperti pada QS. Al-An'am (6): 141

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ



“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat maka yang dimaksud ialah sedekah ialah sedekah wajib, jika disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunat, dan jika disebut hak maka yang di maksud ialah hak milik.

Pada awal kelahiran Islam di mekkah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah SWT dengan ungkapan anfiq fi sabilillah (berinfak kamu di jalan Allah SWT). Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan fi sabilillah.<sup>4</sup>

Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin, dan dana penyiaran agama Islam. Pada saat Al-Qur'an yang memerintahkan berinfak diturunkan, kaum muslimin pernah dua kali mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang akan mereka infakkan dan berapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi Allah tetap saja tidak menentukan batas-batas an infak, dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka infakkan. Allah SWT menyerahkan kepada hati nurani umat Islam untuk mengaplikasikan rasa kesukuran terhadap nikmat dan dan keimanan kepada-Nya, Allah SWT memberi batasan bahwa yang diinfakkan itu adalah yang melebihi dari kebutuhan, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 219

---

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, (Beirut, Dar Al-Fikri, Cet, IV, 1983), h. 676.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan”

Tentang kepada siapa infak itu diserahkan, Allah SWT menerangkannya sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Demikianlah Al-Qur'an memerintahkan kewajiban zakat dengan ungkapan kata nafaqa tanpa memberi batasan tentang jenis harta dan kadar yang dinafkahkan, hal ini berlangsung sampai tahun pertama setelah nabi bersama umatnya hijrah ke madinah. Hal ini dapat dipahami, karna umat Islam saat itu belum siap menerima kewajiban yang beraspek sosial yang di batasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat. Oleh karna itu, kepada mereka diberi kebebasan apa saja dan berapa saja kadar yang mereka nafkahkan.



Pada tahun kedua hijriyah, baru Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dengan menggunakan ungkapan *atu al-zakat* (tunaikanlah zakat). Seiring dengan perintah itu Nabi SAW memberi penjelasan mengenai ketentuan-ketentuannya seperti jenis zakat yang dikenakan wajib zakat, kadar nisab, dan persentasenya. Jadi sebenarnya pensyariatan zakat di madinah merupakan pembaruan terhadap perintah zakat yang diturunkan di Mekah dengan ungkapan *infaq*.

Ketentuan zakat tersebut ditetapkan karna umat islam saat itu sudah berbeda dengan ketika mereka di mekah. Di Madinah mereka telah memiliki iman yang terkonsentrasi dan wilayah kehidupan mereka pun menjadi luas. Mereka telah membangun satu masyarakat yang memiliki sistem kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai disamping kondisi mereka yang telah memungkinkan menerima ketentuan dan batasan zakat. Puncak dari pensyariat zakat adalah menetapkan atau mengumumkannya sebagai salah satu rukun islam oleh Nabi SAW berdasarkan QS. al-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”

Ayat itu mengandung arti bahwa menunaikan zakat salah satu syarat seseorang menjadi saudara seagama. Dari sini dipahami bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dapat

disebut muslim, sehingga para ulama menetapkan zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>5</sup>

Demikian pula wasiat Nabi SAW kepada sahabat mu'azin bin jabal ketika mengutusnyanya untuk menjadi gubernur di negeri yaman, sebagai mana hal itu dijelaskan dalam hadis yang artinya:

Dari ibnu Abbas, sesungguhnya nabi SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, berpesan: "sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah jika meneria seruanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang yang kaya dari mereka dan akan ~~dan akan~~ diserahkan kepada orang-orang yang fakir miskin mereka...(HR al-jamaah).

## B. Perbedaan Zakat dengan Pajak

Pada masa Nabi Muhammad, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang diwajibkan kepada umat Islam hanya satu yaitu zakat. Kewajiban itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, surat al-baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"

---

<sup>5</sup> Yuuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 229



Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara. Karna negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non muslim yang tidak terkena kewajiban zakat, maka sebagai imbalan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non muslim diwajibkan membayar pajak (jizyah). Kewajiban pajak ini ditetapkan berdasarkan QS. al-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab, wilayah Islam telah meluas ke luar daerah jazirah Arab. Administrasi negara yang sebelumnya sangat sederhana dirasa tidak memadai untuk mengatur wilayah yang besar. Untuk membenahi administrasi yang lebih memadai diperlukan dana yang tidak sedikit; sehingga dana yang selama ini dicukupkan dari sumber zakat, terasa tidak lagi memadai. Untuk itulah pajak diwajibkan kepada penduduk yang non muslim yang

menggarap tanah pemerintah. Tetapi mereka ini kemudian ada yang masuk islam, maka disamping kewajiban pajak tanah kepada mereka juga dibebankan kewajiban zakat. Jadi umat Islam dihadapkan kepada dua beban kewajinban; zakat dan pajak. Disini timbul persoalan baru, apakah umat islam yang telah membayar zakatnya masih diwajibkan membayar pajak atau sebaliknya?.

Umumnya ulama mengatakan seorang muslim tidak boleh menyatukan zakat dengan pajak dalam perhitungan persentasi yang harus dibayarkan. Artinya umat Islam wajib membayar zakat jika telah memenuhi syarat wajib zakat, dan pembayaran pajak yang ditentukan oleh penguasa juga menjadi kewajiban umat Islam<sup>6</sup>.

Amir Syarifuddin menulis bahwa bila terjadi kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat yang wajib dipenuhi bersama, sedangkan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan zakat, maka wajib mengeluarkan harta untuk kepentingan itu.<sup>7</sup>

Ketidak bolehan menyatukan antara pajak dan zakat dalam perhitungan persentase pembayaran disebabkan antara keduanya terdapat banyak perbedaan meskipun dari segi-segi tertentu terdapat persamaan. Wahbah Zuhayli menulis secara rinci perbedaan tersebut, yang kelihatan diikuti penulis-penulis dari indonesia seperti Daud Ali dan Amir syarifuddin, sebagai berikut:

1. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sebagi ibadah yang memerlukan niat dalam pelaksanaannya. Pajak

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, (Beirut, Dar Al Fikri, 1987), h. 894

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang Angkasa Raya), h. 203



adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kewajiban sosial yang tidak memerlukan niat.

2. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila di langgar mendapat hukuman keakhiratan (dosa); sedang pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapat hukuman ke duniaan (penjara).
3. Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya; sedang pajak diwajibkan kepada semua rakyat muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin.
4. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis nabi SAW; sedang kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan.
5. Zakat hanya diserahkan kepada *asnaf* yang selapan seperti yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an; pajak diserahkan kembali kepada semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemasalahatan bersama.
6. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedang pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.<sup>8</sup>

Disamping terdapat perbedaan-perbedaan, terdapat pula persamaan antara keduanya. Diantara persamaanya ialah bahwa kedua bentuk kewajiban itu di bebankan kepada harta

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II, h. 894; Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 50; Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, h. 200-202; Dan Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 997-103

kekayaan seorang dan pada pribadi yang bersangkutan yang digunakan untuk kepentingan kemasalahatan manusia.

### C. Wajib Zakat

Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

#### 1. Merdeka (*al-Huriyah*)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuanya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karna ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuanyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuanya maupun dirinya sendiri. Karna tuanya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sen, iri tidak sempurna memiliki hartanya.<sup>9</sup>

#### 2. Islam

Oleh karna zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat ( nuzakki ) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Karna orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakat maka menurut fuqaha syafi'iah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang di

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II., h.738, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, (Beirut , Dar Al-Fikri), h. 236



Yang dimaksud dalam istilah ini ialah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan atas dasar syarat ini seorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karna ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karna hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.<sup>13</sup>

#### 6. Sampai Haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya: tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi SAW bersabda yang artinya:

Dari Ali Karamallahu Wajhahu, Sesungguhnya nabi Saw bersabda: "tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya." (HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi)<sup>14</sup>

#### D. Mustahik Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat (infaq) itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, jilid I, h. 273.

<sup>14</sup> Al Kahlani, *Op.Cit.* h. 128

Imam Al-Gazali mengertikannya dengan orang yang tidak memilik harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar yang diluar kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan statusnya dari golongan fakir.

## 2. Orang Miskin.

*Fakir = 35% dari kebutuhan  
miskin = 50% dari kebutuhan*

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba berkurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah itu jelas berbeda. ahli fiqh mazhab Syafi'i dan Hambali misalnya mengatakan makna kedua istilah itu jelas berbeda. Orang fakir, menurut mereka, lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.<sup>16</sup>

Diantara alasan yang mengatakan bahwa orang fakir lebih berat keadaan ekonominya bila dibandingkan dari orang miskin ialah:

- a. Bahwa dalam ayat 60 al-taubh Allah SWT mendahulukan penyebutan golongan fakir dari golongan

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 879



Ayat ini menunjukkan bahwa orang miskin itu masih memiliki harta dan pekerjaan yaitu sampan yang digunakan untuk mencari nafkah sebagai nelayan; sedangkan orang fakir tidak pernah disebut Allah dalam al-qur'an sebagai orang yang memiliki harta dan usaha.<sup>18</sup>

Fuqaha dari kalangan Hanafiah dan Malikiah mengatakan orang miskin lebih parah kehidupan ekonominya dari orang fakir dengan alasan firman Allah SWT:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (Q.S.Al-Balad (90): 16)

Ayat tersebut, menurut mereka, menandakan bahwa orang miskin itu mengalami penderitaan yang cukup berat sehingga disifati dengan *za matrabah* yang berarti bertanah atau bergelimang dengan debu. Mereka tidak punya tempat sehingga tidur di tanah, dan boleh jadi juga tidak punya pakaian sama sekali sehingga harus ditutupi tubuhnya dengan tanah.<sup>19</sup>

### 3. Amil Zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kedalam pengertian ini semua orang

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 34

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit* Jilid 2, h. 870

Adapun kelompok non muslim yang digolongkan kepada *muallaf qulubuhum* yang berhak menerima zakat ialah kelompok non muslim yang diijinkan hatinya dengan memberi zakat; dengan zakat itu diharapkan terbuka hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Nabi SAW pernah membarikan 100 ekor unta kepada Shafwan ibn Umayyah, sehingga kemudian Sofyan berkata: "sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling benci kepadaku, tetapi ia selalu memberi kepadaku sehingga ia menjadi manusia yang paling sayang kepadaku (HR Abu Daud).<sup>21</sup>

Sebenarnya tidak semua ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada muallaf golongan non muslim. Para ahli fiqh yang menyetujui pemberian zakat kepada golongan non muslim ialah Hanabilah dan Malakiyah, mereka membolehkannya dengan tujuan merangsang hati non muslim kepada Islam. Sementara itu, para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak setuju memberikan zakat kepada mereka setelah Nabi SAW wafat, sebab pemberian nabi kepada mereka adalah di saat umat Islam masih sedikit dan lemah, sedangkan non-Islam (musuh) jauh lebih kuat. Dimasa *khulafa al-rasyidin*, umat Islam telah kuat, sehingga tidak perlu lagi menjinaki hati non-muslim untuk masuk Islam.<sup>22</sup>

## 5. *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka.

---

<sup>21</sup> Al Kahlani, *Op.Cit.*, jilid IV, h. 166

<sup>22</sup> Wahbah Juhairi, *Op.Cit.*, jilid II, h. 871



Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riqab* itu adalah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuanya kesempatan untuk menebus dirinya, sehingga jika tidak dibantu kemungkinannya tetap saja menjadi hamba sahaya. Untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dibantu dengan memberi zakat kepadanya. Dengan bantuan dana zakat itu diharapkan ia dapat menebus dirinya.

Ahli fiqh mazhab Maliki mengatakan bahwa *riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat, kemudian dimerdekakan.<sup>23</sup>

Termasuk ke dalam pengertian ini membebaskan orang Islam yang sedang ditawan oleh musuh.

#### 6. *Ghārimin*

Amir Syaripuddin mengertikan *gharimin* sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu tumbuh melalui kegaitan-kegiatan sosial, bukan kemaksiatan.<sup>25</sup>

Para ahli fiqh klasik, seperti merumuskan definisi *gharim* itu sebagai orang yang berutang yang sulit dilunasi, baik utang itu terjadi karena kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Jika ia berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, diberi bantuan zakat melunasi utangnya jika ia seseorang yang fakir. Jika ia berutang untuk kepentingan orang lain (masyarakat) maka diberi bantuan zakat untuk melunasinya agar nama

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, jilid I, h. 331

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 191

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 250

*gharim*, walaupun ia seorang yang kaya. Dasar pemikiran ini adalah hadis Nabi yang artinya:

Dari sa'id al-khudari ra, dari Rasulullah SAW, berkata: "Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali lima hal, yaitu orang kaya yang berperang untuk jalan Allah, petugas zakat, seorang yang berutang, seorang yang membeli zakat itu dengan uangnya sendiri, seorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu ia memberi zakat kepadanya, kemudian yang miskin tadi menghadiahkan zakat kepadanya, kemudian yang miskin tadi menghadiahkan zakat itu kepadanya." (HR Abu Daud dan Ibn Majah)

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *gharim* yang berhak menerima zakat itu ialah orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak cukup satu nisab jika utangnya dilunasi dari hartanya itu. Ini berarti jika ia melunasi mencapai satu nisab, maka tidak berhak menerima zakat meskipun ia berutang, karena pada hakekatnya ia masih mampu melunasinya dan dengan melunasi itu tidak sampai menjadi orang miskin, fuqaha ialah orang yang dililit utang yang bukan karena boros dan maksiat, sedang ia tidak mempunyai harta pembayarannya, dan bukan pula sengaja berutang untuk mendapatkan zakat.

#### 7. *Fi sabilillah*

Pada awalnya sesuai dengan konteks sosial, *fi sabilillah* diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Zakat digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perangnya pengertian ini wajar, karena penggunaan kata *sabilillah* mutlak digunakan untuk peperangan, sebab Allah SWT sering mengaitkannya dengan



kemaslahtan umat manusia seperti membangun madrasah, tempat-tempat peribadatan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dapat disebut *fi sabilillah*, oleh sebab itu kepada mereka boleh diberikan zakat sebagai bantuan dana untuk haji. Pendapat ini disetujui oleh kebanyakan ahli fiqh dari mazhab Hanafi dan Hambali dengan alasan hadis Nabi SAW.

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya haji merupakan *fi sabilillah*.” (HR Abu Daud)

Jadi *sabilillah* dalam keadaan tidak perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia seutuhnya atau membangun kehidupan beragama dan bernegara.

#### 8. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk kedalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim. Mereka keluar meninggalkan negaranya mencari perlindungan di Negara Islam lainnya. Kepada mereka diberi zakat sebagai bekal hidup di Negara orang lain. Termasuk juga dalam pengertian umum *ibn sabilillah* perjalanan yang membutuhkan dana untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah lain.

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 202

### E. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Al-Aura'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjealaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...(Q.S. Al-Baqarah (2): 43)

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu....(Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata "*nafaqa*" yang difahami untuk arti zakat wajib. Akan



tetapi, umumnya ahli fiqh, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka yang wajib dizakatkan melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.

Untuk merinci dan menjelaskan keumuman makna ayat diatas, dirujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang secara rinci menyebut jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berikut nisab dan kadar atau persentasi zakatnya. Harta kekayaan yang wajib dizakatkan melalui penjelasan hadist Nabi itu adalah senagai berikut:

### 1. Emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW berikut:

Dari Ali karamullah wajhah bahwa Nabi SAW berkata: "Tidak wajib atasmu mengelurkan zakat emas kecuali bila sampai 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah sampai haul-nya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar. "(HR Abu Daud dan al-Baihaqi).

Dari hadis di atas dapat ditarik pengertian bahwa harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila sampai senisab, yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan jumhur ulama fiqh sama dengan 91 23/25 gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2 ½ persen atau seperempat puluh (1/40) dari jumlah harta emas dengan syarat telah berlalu satu tahun dimiliki.

Kewajiban zakat harta kekayaan dalam bentuk perak ditetapkan berdasarkan hadist Nabi SAW:

Nabi SAW bersabda: “tidak ada kewajiban zakat atas emas yang tidak sampai 20 misqal (20dinar) dan tidak pula atas yang kurang 200 dirham.” (HR Abu ‘Ubaid)

Pengertian yang dikandung hadis di atas adalah bahwa perak dikenakan wajib zaka apabila sampai nisab yaitu 200 dirham. Zakatnya dikeluarkan sebanyak  $2\frac{1}{2}$  persen atau  $\frac{1}{40}$  dari keseluruhan perak, sesuai dengan ketepatan hadis Nabi SAW:

Dari Ali karamullah wajjah, sesungguhnya Nabi bersabda: “ ... dan tidak ada kewajiban zakat atas emas dan perak yang berjumlah 190 dirham. Tetapi apabila sampai 200 dirham, maka kewajiban zakatnya adalah 5 dirham.” (HR Asihab al-Sittah).

Jadi nisab emas berbeda dengan nisab perak, tetapi kadar zakatnya sama yaitu  $2\frac{1}{2}$  persen dari jumlah harta emas atau perak.

Dimasa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, emas dan perak dalam kehidupan perekonomian masyarakat, berfungsi sebagai alat tukar. Sekarang fungsi ini lebih banyak diperankan oleh uang kertas, karena uang kertas lebih mudah menyimpan, membawa, dan mencetaknya. Sedangkan emas dan perak, sekarang lebih mudah berfungsi sebagai mata uang standar.

Mengingat alat tukar atau alat bayar kebanyakan diperankan oleh uang kertas, seperti di Indonesia, maka jika harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak dikenakan wajib zakat, maka wajar kalau harta kekayaan dalam bentuk uang kertas dan mata uang lainnya dikenakan wajib zakat. Dalam hal ini tentu jika sampai nisab dan cukup haul-nya. Nisab dan persentase zakatnya disamakan dengan emas, yaitu 20 dinar dengan zakat 2,5 persen.



## 2. Harta Perniagaan.

Yang dimaksud dengan harta perniagaan ialah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan<sup>27</sup> Para ulama fiqh telah sepakat menetapkan kewajiban zakat atas harta perniagaan berdasarkan hadis Nabi SAW:

Dari Samurah ibn Jundub ra, berkata: “Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan.” (HR Abu Daud)<sup>28</sup>

Jika terhadap harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ditemukan hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban zakatnya serta nisab dan kadar zakatnya, terhadap harta perniagaan tidak ditemukan hadis yang menjelaskan ketentuan-ketentuan zakatnya. Yang jelas harta ini wajib dizakatkan berdasarkan umum ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menetapkan perhitungan nisab dan kadar zakatnya dapat dikiaskan kepada harta kekayaan emas dan perak. Karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai, maka menurut jumhur fuqaha, zakatnya mesti dikeluarkan dalam bentuk nilai. Tetapi ahli fiqh mazhab Hanbali, membolehkan mengeluarkan benda atau barangnya dan boleh juga dalam bentuk nilai,<sup>29</sup> dengan dasar pemikiran bahwa tujuan utama dari kewajiban zakat adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin. Oleh karena itu tidak mesti dengan yang diperhitungkan nisabnya,

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 185

<sup>28</sup> Al Kahlani, *Op.Cit*, jilid II, h. 136

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit* jilid II h. 796

### 3. Unta

Kewajiban zakat harta kekayaan dalam bentuk unta ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Dari Anas ibn Malik, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq mengirim surat kepadanya (Anas bin Maliki) tentang kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan yang ditetapkan Allah kepadanya, yaitu setiap dalam jumlah 24 ekor unta (baik jantan maupun betina) kewajiban zakatnya adalah kambing. Dalam setiap 5 ekor zakatnya seekor kambing, dan 25 sampai 35 ekor zakatnya seekor anak unta berumur satu masuk dua tahun. Dari 36 sampai 45 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Dari 46 sampai 60 ekor unta zakatnya seekor anak unta berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Dari 61 sampai 75 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 4 masuk 5 tahun. Dari 75 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2 masuk 3 tahun, dari 91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 3 masuk 4 tahun. Jika lebih dari 120 ekor unta, maka setiap kelebihan 40 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 2 masuk 3 tahun. Dan pada setiap kelebihan 50 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 3 masuk 4 tahun,” (HR al- Bukhari).<sup>30</sup>

Jumlah unta	Zakatnya	Keterangan Umur
5 Ekor	1 Ekor kambing	Umur 1 Tahun Ke>
10 Ekor	2 Ekor kambing	Sda
15 Ekor	3 Ekor kambing	Sda

---

<sup>30</sup> Al Kahlani, *Op.Cit*, jilid II, h. 123



20 Ekor	4 Ekor kambing	Sda
<u>25-35 Ekor</u>	<u>1 Ekor Unta</u>	1 masuk 2 tahun
36-45 Ekor	1 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
46-60 Ekor	1 Ekor Unta	3 masuk 4 tahun
61-75 Ekor	1 Ekor Unta	4 masuk 5 tahun
76-90 Ekor	2 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
91-120 Ekor	2 Ekor Unta	3 masuk 4 tahun
121-160 Ekor	3 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
Setiap tambahan 40 ekor dari 120	1 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
Setiap tambahan 50 ekor dari 120	1 Ekor Unta	3 masuk 4 tahun

Para ahli fiqh telah menyepakati bahwa minimal jumlah unta yang dikenakan wajib zakat adalah 5 ekor. Oleh karena jumlah hanya 5 ekor, maka pemiliknya akan merasakan berat jika harus mengeluarkan seekor unta sebagai zakat. Di samping itu kurang adil rasanya jika kewajiban zakatnya sama dengan 25 ekor unta yang juga kewajiban zakatnya seekor unta. Oleh sebab itu, kewajiban zakatnya ditetapkan dengan jenis kambing yang berumur satu tahun. Dengan demikian terdapat keseimbangan nilai seekor kambing usia setahun untuk 5 ekor unta dengan seekor unta usia satu tahun masuk 2 tahun untuk 25 ekor unta.

Unta yang belum mencapai 5 ekor tidak wajib dizakatkan. Unta yang dikenakan kewajiban zakat seperti ketentuan

diatas adalah apabila sampai 5 ekor dan itu harus yang dipelihara lepas di padang rumput.<sup>31</sup>

#### 4. Kambing

Kambing yang dikenakan kewajiban zakat adalah yang dipelihara lepas di lapangan rumput dan bukan yang dikandungkan dengan makanan yang disediakan. Kewajiban zakatnya ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diterima dari Anas tentang kelanjutan hadist mengenai isi surat Abu Bakar ash- Shidiqi yang dijelaskan pada zakat unta. Kelanjutan hadis tersebut ialah, yang artinya:

Kewajiban zakat atas kambing hanya dilepas di padang rumput. Bila dalam jumlah 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Lebih dari 120 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing; lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing; lebih dari 300, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing; tidak ada kewajiban zakat atas kambing bila dalam jumlah

Hadis di atas mengandung arti bahwa jumlah minimal kambing yang dikenakan kewajiban zakat adalah 40ekor dan ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut:

jumlah kambing	Zakatnya	Ket Umur
<u>40-120 Ekor</u>	1 Ekor Kambing	1 Tahun keatas
121-200 Ekor	2 Ekor kambing	Sda
201-300 Ekor	3 Ekor Kambing	Sda

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili , *Op.Cit*, jilid II, h. 837



Setiap Kelebihan      1 Ekor kambing      Sda

100 Ekor dari 300 Ekor

Ketentuan-ketentuan zakat kambing yang dikemukakan di atas, menurut kebanyakan ahli fiqh, mencakup kambing dan domba. Antara kedua jenis kambing itu tidak ada perbedaan baik dalam hal nisab atau kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Akan tetapi menurut para ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah membedakan antara keduanya. Menurut mereka, zakat dari kambing adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun, dan zakat dari domba cukup 1 ekor kambing umur 1 tahun.

#### 5. Sapi dan Kerbau

Seperti halnya zakat kambing, sapi dan kerbau yang dikenakan kewajiban zakat pun harus yang dilepas (digembala) dipadang rumput, bukan yang dikandangkan dengan makanan yang disediakan setiap hari. Kewajiban zakat dasarkan sapi dan kerbau ditetapkan berdasarkan hadist Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Dari Mua'az ibn Jabal ra. Sesungguhnya Nabi SAW mengutuskan negri Yaman, dan memerintahkan agar memungut zakat sapi dari setiap jumlah 30 ekor zakatnya seekor sapi berumur satu tahun, dan setiap jumlah 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi umur 2 tahun. (HR al-Khamsah)

Dari hadist di atas ditarik pengertian bahwa minimal nisab sapi dan kerbau adalah 30 ekor dengan zakat seekor sapi atau kerbau. Tidak ada kewajiban zakatnya bila jumlahnya belum mencapai 30 ekor. Nisabnya diperhitungkan dengan perhitungan tahun (haul)

Penjelasan ketentuan zakat sapi dan kerbau ini dapat diperhatikan rumus berikut:<sup>32</sup>

Jumlah sapi/ kerbau	Zakatnya sapi/kerabau	Keterangan umur
30-39 Ekor	1 Ekor	1 masuk 2 tahun
40-59 EKor	1 Ekor	2 masuk 3 tahun
60-69 Ekor	2 Ekor	1 masuk 2 tahun
80-89 Ekor	2 Ekor	2 masuk 3 tahun
90-99 Ekor	3 Ekor	1 masuk 2 tahun
Setiap 100 Ekor	2 Ekor	1 ekor 2 umur 1 masuk 2 dan 1 ekor lagi umur 2 masuk 3 tahun

#### 6. Makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan

Pada masa Nabi SAW hasil tanaman dalam bentuk makanan yang dikenakan kewajiban zakat terdiri dari gandum, jelai, anggur kering, dan kurma.<sup>33</sup> Kewajiban zakatnya didasarkan kepada hadist-hadist Nabi SAW diantaranya yang artinya adalah:

Dari Abu Musa dan Mu'az ra, sesungguhnya Nabi SAW mengutus keduanya ke Negara Yaman dan memerintahkan mereka supaya tidak memungut zakat (makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan) kecuali dari empat jenis, yaitu gandum, jelai, kurma dan anggur kering. (HR al-Daruzuthni dan al-Hakim)

<sup>32</sup> Ibid, h. 834

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, jilid I, h. 294



Hadist di atas menetapkan jenis-jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan (hasil tanaman) yang dikenakan wajib zakat.

Yang dimaksud dengan wasaq ialah jenis alat yang biasa digunakan orang Arab sebagai alat pengukur atau penyukat hasil tanaman mereka. Satu (1) wasqa adalah 60 mud. Satu (1) mud adalah 3,1 liter. Jadi nisab hasil tanaman adalah 930 liter. Sedangkan kadar zakatnya menurut ketetapan dari hadist Nabi ialah 10 persen bila tanaman itu diiri dengan mengeluarkan dana, sebagaimana hal ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang artinya sbb:

Dari Ibn Umar, dari bapaknya, dari Nabi SAW yang berkata : “terhadap tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air zakat 10 persen, dan terhadap tanaman yang diiri dengan air yang diangkat dengan alat pengangkat, zakatnya 5 persen. “ (HR al-Bukhari)

Hadis yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari di atas mengandung pengertian bahwa hasil tanaman yang dikenakan kewajiban zakat ialah bila sampai dalam jumlah senisab. Tanaman tersebut terbatas kepada 4 macam yaitu gandum, jelai, anggur dan kurma. Ini berarti hukum zakat tersebut hanya berlaku pada keempat jenis hasil tanaman itu dan tidak dapat kepada jenis lain berdasarkan nas (hadist). Pertambahan hukum wajib zakat terhadap hasil tanaman selain dari yang disebut oleh hadist tadi, diterapkan berdasarkan kias dengan tetap mempertahankan persamaan *illat* .

Penetapan keempat jenis hasil tanaman yang disebut di atas sebagai yang dikenakan wajib zakat oleh Nabi SAW adalah

sesuai konteks sosial pada masa itu. Pada masa hidup Rasulullah SAW yang dijadikan bahan makanan yang populer hanya keempat jenis hasil tanaman tersebut, sedang hasil tanaman yang lain yang dikenal sekarang seperti jagung, padi, kacang, dan sebagainya belum dikenal dimasyarakat saat itu. Oleh sebab itulah Nabi SAW hanya menyebut keempat jenis hasil tanaman yang dizakatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan keempat macam tadi tidak hasil tanaman yang lain dikenakan wajib zakat.

Hal ini juga berarti keumuman makna ayat 266 surat al-baqrah di atas tetap berlaku, karena menyebut sebagaimana suatu lafal umum, tidak berarti membatasi keumumannya.

**Tabel Zakat Penghasilan**

NO	Jl. Penghasilan		Kadar zakat	Jumlah zakat	
	Tiap bulan	Tiap Tahun		Tiap bulan	Tiap tahun
1	Rp. 1.200.000	14.400.000	2,5%	30.000	360.000
2	Rp. 1.400.000	16.800.000	2,5%	35.000	420.000
3	Rp. 1.600.000	19.200.000	2,5%	40.000	480.000
4	Rp. 1.800.000	21.600.000	2,5%	45.000	540.000
5	Rp. 2.000.000	24.000.000	2,5%	50.000	600.000
6	Rp. 2.200.000	26.400.000	2,5%	55.000	660.000
7	Rp. 2.400.000	28.800.000	2,5%	60.000	720.000
8	Rp. 2.600.000	31.200.000	2,5%	65.000	780.000
9	Rp. 2.800.000	33.600.000	2,5%	70.000	840.000
10	Rp. 3.000.000	36.000.000	2,5%	75.000	900.000



11	Rp. 3.200.000	38.400.000	2,5%	80.000	960.000
12	Rp. 3.400.000	40.800.000	2,5%	85.000	1.020.000
13	Rp. 3.600.000	43.200.000	2,5%	90.000	1.080.000
14	Rp. 3.800.000	45.600.000	2,5%	95.000	1.140.000
15	Rp. 4.000.000	48.000.000	2,5%	100.000	1.200.000
16	Rp. 4.500.000	54.000.000	2,5%	112.500	1.350.000
17	Rp. 5.000.000	60.000.000	2,5%	125.000	1.500.000
18	Rp. 6.000.000	72.000.000	2,5%	150.000	1.800.000
Dst					

Catatan :

1. Wajib zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas murni
2. Boleh dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun
3. Bagi yang belum sampai nisab, sangat di anjurkan membayar infaq/sadaqah sesuai keikhlasan hati nurani, atau berlatih/belajar zakat sebesar 2,5%.

#### **F. Kekayaan terpendam dan Tambang**

Dalam istilah Arab kekayaan ini disebut *Rikaz* yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka. Termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasil temuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20 % dari jumlah yang ditemukan.

Hasil temuan tersebut menurut ahli fiqh, harus jelas berasal dari milik orang-orang jahiliah. Hal itu dapat diketahui dari tanda-tanda yang terdapat pada barang temuan itu, misalnya dari motif, tulisan, ukiran, dan lain-lain. Jika dari

barang tersebut dapat tanda-tanda yang menunjukan bahwa pemiliknya adalah orang Islam. Maka barang itu tidak dapat disebut *rikaz*, tetapi disebut *luqathah* (barang temuan). Disebut juga *luqathah* jika tidak diketahui pemilik yang menanamnya apakah orang Islam atau orang kafir.<sup>34</sup>

Harta yang digali dari tanah yang bukan simpanan orang-orang terdahulu, melainkan kekayaan bumi semata yang di ciptakan Allah SWT seperti emas, perak, logam, tembaga, timah, permata dan lain yang bernilai disebut hasil tambang (*al-ma'dan*).

Kewajiban zakat harta terpendam dan tambang dijelaskan oleh nabi SAW dalam hadis yang artinya:

Dari abi hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW berkata; "...dan pada harta terpendam zakatnya seperlima. (HR al-jamaah ).

Kewajiban zakata tambang disamakan dengan harta terpendam, yaitu seperlima dari yang digali itu wajib dikeluarkan sebagai zakat.

#### **G. Hikmah Dan Fungsi Sosial Zakat**

Manusia disamping makhluk individu, diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial kehidupannya selalu terkait dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan masyarakatnya; namun hasil materil yang diperolehnya tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadarinya atau tidak.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia semuanya berasal dari keturunan yang satu; sehingga antara seorang dengan yanag

---

<sup>34</sup> Ibid, jilid 1, h. 315



lainnya terdapat pertalian darah yang menjadikanya memiliki hubungan persaudaraan. Jadi kebebasan dan persaudaraan ini yang mengantar pada kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan untuk orang lain dalam bentuk zakat.<sup>35</sup>

### 1. Hikmah Zakat

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariatan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Di antara hikmah yang dimaksud ialah:

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorsng *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan, seperti disyariatkan Allah SWT dalam firmanya ( QS. At-Tawbah (9): 103 ).
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (*mustahiq*)-nya, tapi juga kepada *muzakki-nya*. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu. Al-qur'an menyatakan sebagai berikut: (QS. Muhammad (47); 37-38).
- c. Zakat bila diserahkan kepada *mustahiq-nya* secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatanya lebih baik. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah (2); 276 )

---

<sup>35</sup> Qurais Sihab, *Filsafah Ibadah Dalam Islam* dalam buku Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bumi aksara, 1992 h. 189-190

- d. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi *muzakki*, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya, disamping terciptanya daya beli dan daya produksinya.<sup>36</sup> Allah SWT berfirman: (QS. Ar-Rum (30); 39 )

Hasbi ash-Shiddiqi memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini sebagai berikut:

- a. Zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir, dan mengantarnya kepada sifat kedermawanan.
- b. Zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Yang pada giliran ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusus'.
- c. Zakat sebagai perwujudan dari rasa ke syukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, mendorongnya lebih memperkokoh tauhid, karna zakat juga merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap keesaan Allah SWT.
- d. Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dapat menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak. Segala yang dimilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikembalikan kepada-Nya melalui, antara lain pembayaran zakat.

---

<sup>36</sup> Qurais Sihab, Ibid, 190, dan Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshari Umar, (Pustaka Dian, Jakarta) , h. 93



- e. Kebiasaan memberikan zakat dapat menghantarnya menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat keborosan dan ketamakkan.
- f. Dengan zakat harta seseorang lebih terjamin dari kehilangan, kesiasiaan, kemusnahan; karna dengan zakat harta yang tersisa mendapat berkah dari Allah SWT seperti yang ditegaskan Nabi dalam sabdanya: “ bentengilah hartamu dengan zakat “ ( HR al-jamaah )
- g. Hikmah yang terpenting dari pemberian zakat itu ialah terlaksananya perintah Allah SWT.<sup>37</sup>

## 2. Fungsi Sosial Zakat

Zakat ssebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukan bahwa zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukanya.

Fenomena ditengah masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dalam ekonomi; ada golongan yang ekonominya lemah, dan ada golongan yang ekonominya kuat , dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menjolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Biasanya golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak.

Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karna sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan

---

<sup>37</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta, Bulan bintang, 1994), h. 232-233

Islam, menulis bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tolong menolong sesama manusia, orang-orang yang telah beruntung memperoleh rezeki yang banyak memberikan sebagian yang diterimanya itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Salah satu bentuk pemberian yang diperintahkan itu ialah dalam bentuk zakat. Pemberian dalam bentuk zakat ini hukumnya wajib. Adanya kewajiban disini bukan disebabkan antara muzakki dan mustahik terikat dalam ikatan tanggung jawab yang mengandung hak dan kewajiban seperti pemberian nafkah oleh suami terhadap istri atau ayah terhadap anaknya.

Dalam lembaga zakat antara pemberi dan penerima sebenarnya tidak mempunyai hubungan apa-apa. Munculnya kewajiban dipundak si-pemberi semata karena pada hartanya terdapat sesuatu yang menyebabkan ia wajib mengeluarkannya, yaitu memiliki harta banyak, dan pada si-penerima ada sesuatu yang menyebabkan ia berhak menerima yaitu mempunyai kebutuhan.

#### **H. Pengelolaan Dan Penggunaan Zakat**

Al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membayarkan zakatnya (QS. Al-Baqarah (2): 110). Perintah itu bersifat mutlak, tidak ada batasan tentang siapa saja yang dikenakan wajib zakat, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Ibnu Abbas, diketahui bahwa yang diperintahkan mengeluarkan zakat itu hanya terbatas kepada orang-orang yang kaya, yang memiliki hartanya diketahui dari hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan pada bagian terdahulu. Ketahuan siapa-siapa yang berhak menerima zakat diketahui dari QS. al-Taubah (9): 60.

Dari ayat di atas dan hadis-hadis Nabi dimaksud, belum diketahui secara jelas bagaimana cara mengelola dan mendaya



gunakan zakat itu sehingga benar-benar tujuan dari pensyariatannya dapat terwujud.

Dalam membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yaitu waktu pembayaran zakat oleh muzakki, pembayaran kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, cara pembayaran dan pendistribusiannya, dan lembaga penggolongannya.

### **1. Waktu Pembayaran**

Para ahli telah sepakat atas kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (bagi harta kekayaan yang disyaratkan haul). Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah sau nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera membayarkan zakatnya jika ia mampu melaksanakannya, sehingga jika ia melakukan penundaan pembayarannya dikenakan sangsi akhirat (dosa). Selain sangsi akhirat, kesaksian orang yang sengaja meunda pembayaran zakat tidak diterima, karena ia telah berkhianat dengan idia tidak diterima, karena ia telah berkhianat dengan tidak mempunyai halangan untuk itu. Perintah membayarkan zakat tidak mempunyai halangan untuk itu. Perintah membayarkan zakat menunjukkan adanya kewajiban memberikan hak orang dengan segera, jika tidak segera dibayarkan berarti maksud perintah untuk mencukupi hajat orang miskin tidak terlaksana.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas, perak, harta perdagangan, dan timah dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayaran dilakukan sekali setahun.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanam-tanaman dan buah-buahan dibayarkan zakatnya setiap selesai

panen walaupun panennya berulang kali dalam setahun, tentu menurut Syafi'iyah jika telah sampai nisab, dan menurut Hanafiyah, cukup atau tidak nisab harus dizakatkan.

## **2. Membayar zakat sebelum waktunya**

Pada prinsipnya para ahli berpendapat bahwa zakat harta tidak boleh dikeluarkan sebelum kewajiban tiba, sebab saat itu ia belum memenuhi syarat untuk dikenakan wajib zakat.

Akan tetapi bila ternyata seseorang telah terkena kewajiban zakat, menurut kebanyakan ahli, boleh membayarkannya dengan segera meskipun persyaratan wajib zakat baru sebagian yang terpenuhi. Misalnya seseorang telah memiliki harta dalam bentuk emas dan perak dalam jumlah nisab, tetapi pemiliknya dalam jumlah demikian belum sampai setahun, ia boleh mendahulukan membayar zakatnya. Alasan mereka ialah hadis Nabi yang artinya sbb:

Dari Ali Karamallahu wajhah, sesungguhnya Ibn Abbas meminta kepada Rasulullah SAW agar ia dapat mensegarkan membayarkan membayar zakatnya sebelum tiba masanya wajibnya. Rasulullah SAW. Memberi kemudahan baginya baginya untuk menyegarkan pembayarannya sebelum masa wajibnya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Tirmizi)

Hadis di atas mengundang arti bahwa seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah satu nisab, tetapi haulnya belum tiba, maka ia boleh membayarkan zakatnya sebelum haul. Ahli fiqh dari mazhab Syafi'i menyetujui pemikiran tersebut dengan syarat bahwa *muzakki* tetap memiliki harta dalam jumlah satu



diberikan kepada mustahik yang ada negri tempat tinggal si muzakki. Tetapi jika tidak ada mustahik yang berada negeri lain.

Pendapat imam Syafi'i yang menginginkan agar zakat diberikan kepada semua yang berada dinegeri zakat, mengandung kelemahan sebagai berikut:

- a. Mustahik yang delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur'an itu bisa berada di berbagai-bagai daerah. Jika demikian muzakki akan meresa kesulitan mambagi-bagikan zakatnya. Jika ia menunggu sampai masing-masing mustahik itu ada, maka tidak sesuai dengan kehendak hadist yang menginginkan zakat itu segera dibayarkan.
- b. Jika zakatnya hanyaa sedeki, sehingga jika dibagi-bagikan kepada semua mustahik, maka tujuan zakat itu tidak terpenuhi, karena bagian yang sedikit yang diterimanya tidak akan banyak manfaatnya.
- c. Ayat yang menerangkan asnaf-asnaf zakat, bukan berarti harus dibagikan kepada mereka semua; tetapi adalah menjelaskan jenis-jenis yang berhak menerima zakat. Jika diberikan kepada salah satu jenis, maka kewajiban terpenuhi.

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan, *muzakki* boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara *mustahik* yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan, karena di antara sekian banyak *mustahik* itu pasti ada yang membutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. Jika *muzakki* boleh memberikan kepada siapa saja yang dikendakinya, bisa orang yang paling butuh tadi ditinggalkan. Oleh sebab itu ahli fiqh Hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada *mustahik* yang berada dinegeri lain adalah *makruh tanzih*, selama

diperhitungkan nisab dan diberikan kepada mustahiknya sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Mu'az ra. bahwa SAW ketika mengutusnyanya ke negeri Yaman bersabda: "pungutlah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing. unta dari unta dan sapi dari sapi." (HR Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat harta benda yang diperhitungkan nisabnya dengan biji-bijian dan ternak, mesti dibayarkan dengan biji-bijian atau ternak.

Adapun harta kekayaan yang diperdagangkan menurut jimmur fuqaha, harus dibayarkan zakatnya dalam bentuk nilai, karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai, jika harta kekayaan yang diperhitungkan nisabnya dengan benda, maka zakatnya harus dalam bentuk benda, jika diperhitungkan dengan nilai harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk nilai.

Menurut para ahli fiqh dari mazahab Hanafi, muzakki boleh membayarkan zakat harta kekayaannya dengan benda atau nilainya, baik yang diperhitungkan nisabnya dengan benda maupun dengan nilai; karena yang menjadi tujuan zakat adalah menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Untuk menutupi kebutuhan itu tidak mesti dengan benda tapi dapat juga dengan nilai.

Ahli fiqh dari mazahab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kepada orang-orang fakir dan miskin boleh dibayarkan dengan sesuatu yang diyakini kebutuhan keduanya tertutupi, misalnya jika mereka memiliki kemampuan bertani diberikan alat-alat pertanian, jika mereka memiliki kemampuan berdagang, diberikan dalam bentuk modal dan seterusnya. Alasan mereka adalah zakat



QS. al-Taubah (9): 60 yang menetapkan bahwa amil zakat salah satu diantara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.

QS. al-Taubah (9): 103 yang memberi tugas kepada Nabi SAW. Memungut zakat dari orang yang kaya dan menyalurkan kepada yang berhak.

Hadis Yang diterima dari Mu'az ibn Jabal yang menerangkan bahwa Nabu SAW memerintahkan agar memungut biji-biiian dari hasil biji-bijian dan kambing.

Ayat dan Hadis tersebut cukup sebagai alasan mengatakan adanya lembaga pengelola zakat, yang disebut amil zakat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Dalam UUPA (undang undang pokok agrarian, UU No. 5 tahun 1960) yang merupakan undang undang pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945, pada bagian menimbang huruf a, disebutkan antara lain, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut dinyatakan, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, maka syari'at islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama islam, yang dipeluk oleh sebagian besar ( $\pm 90\%$ ) penduduk Indonesia. Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. "Oleh karena itu, kalau kita beboicara mengenai masalah waqaf, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pada pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syari'at Islam, dari mana sebenarnya lembaga tersebut timbul"<sup>36</sup>

Menurut para ahli, lembaga sosial yang hampir sama dengan waqaf telah dikenal di Indonesia sebelum Islam

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Masalah Pewakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung : Alumni, 1979), h. 5.



benda benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal disana.

3. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan "Tanah Pareman" adalah tanah Negara yang dibebaskan dari pajak "Landrente" yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada Candi, untuk kepentingan bersama.

Menurut Ter Haar, "Lembaga Hukum Wakaf Islam ini telah diterima (gerecipereed) di Banyak daerah nusantara ini, dan yang disebut dengan istilah belanda 'Vrome Stichting'"<sup>39</sup> Resepsi wakaf dalam hukum adat tak mengherankan, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama islam, "inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari agama (godsdienstug bertanddeel van het adatrecht)"<sup>40</sup> Malahan dapat terjadi benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nadzir)<sup>41</sup>

Pada tahun 1960, bangsa Indonesia telah berhasil membuat peraturan dasar pokok-pokok agraria yang merupakan peraturan dasar tentang pengaturan masalah agrarian/sumber alam tanah dengan segala isinya, termasuk ruang angkasa, yang tertuang dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini terkenal dengan undang-undang pokok agraria, disingkat UUPA. Dalam undang-undang tersebut sudah dicantumkan tentang ketentuan pokok mengenai perwakafan tanah, yaitu dalam Pasal 49 ayat (3), perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintahan.

---

<sup>39</sup> Ter Haar, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*, (Jakarta : Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, 1968), h. 136.

<sup>40</sup> Rido Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi dan Wakaf* (Bandung : Alumni 1977), h. 132.

<sup>41</sup> Lihat Alinea Kedua Penjelasan Umum PP No. 28 Tahun 1977

yang dapat kita baca dari riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz berkata:

وروى عن عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول  
حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر و قال ألا نصار صدقة  
رسول الله عليه وسلم

"Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW."<sup>43</sup>

Amal wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya "Bairoha". Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwan, dan oleh 'Aisyah isteri Rasulullah SAW.. Gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadat kepada Allah SWT..Jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadat atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum (lihat uraian tentang macam-macam wakaf).

Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di

---

<sup>43</sup> Asy-Syaukani Muhammad bin Ali Muhammad, *Nailul Authar*, (Mesir 1374 H), h.129.



Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani sebagai berikut:

و في الشرع حبس العين على ملك الواقف و التضدق بالمنفعة

Menurut istilah syara' wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.

Menurut Imam Taqiyuddin<sup>45</sup> :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التشرف في عينه  
تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selanjutnya pengertian Wakaf yang diberikan oleh para ulama disebutkan Wahbah Al-Zahili.<sup>46</sup>

Pengertian pertama menurut Abu Hanifah:

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah

---

<sup>45</sup> Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar fi Haili Ghoyatil Ikhtisor*, Ahmad bin Said Nabham, (Surabaya: t.t ), h. 319

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zahili, *Al Fiqh al Islamy Wa Abdillatuhu*, Daar El Fikr, Damsyiq, 1989 h. 153-156

Hasbi Ash-Shiddieqy<sup>47</sup> menulis pendapat Asy-Syafi'i yang disetujui oleh Malik dan Ahmad tentang pengertian wakaf ini sebagai berikut: "Wakaf itu suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya".

Maulana Muhammad Ali MA., LLB.<sup>48</sup> memberikan pengertian wakaf sebagai berikut: Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal.

Disisi lain menurut Anwar Haryono, S.H.<sup>49</sup>; Wakaf adalah penglepasan hak milik seorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya (buahnya) dipergunakan untuk kepentingan umum. Penglepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai shodaqoh jariyah (continue).

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan.

Timbulnya perbuatan wakaf itu tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadat yang diperintahkan oleh agama; oleh sebab itu, dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam

---

<sup>47</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) h.159

<sup>48</sup> Ali Muhammad Maulana, *The Religion Of Islam, Terjemhan R. Kaelan dan HM Bachrum*, (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru 1980), h.467

<sup>49</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.148.



Maha Kuasa (Karunia-Nya) Lagi Maha Memgetahui".  
(Q.S., al-Baqarah (2) : 261).

"Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya)". Kemudian Umar melakukan shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".

Dari Anas berkata: Abu Thalhah sahabat Anshor yang kaya di Madinah. Dan satu-satunya harya yang paling dicintainya adalah "Bairoha" (Sebuah kebin korma di dekat Masjid Nabawi) yang menghadap ke masjid. Dan Rasulullah s.a.w. memasuki dan minum air di dalamnya yang baik itu. Ketika ayat Al-Qur'an "Lan tanalul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun" turun, Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah seraya berkata: " Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya: "Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sungguh harta yang paling kucintai adalah "Bairoha", dan ia kujadikan shodaqoh karena Allah. Maka berbuatlah ya Rasulullah menurut kehendakmu". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Bakh" (bentuk kata untuk memuji atau

و المقصود بالصدقة الجارية (الوقف)

"Yang dimaksud dengan sadaqoh jariyah adalah wakaf".<sup>52</sup>

وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف.

"Para ulama mengelompokkan shodaqo jariyah kepada wakaf".<sup>53</sup>

Berpijak dari uraian di atas, ternyata para ulama sepakat bahwa yang dimaksud *shodaqoh jariyah* dalam hadits tersebut adalah *wakaf*.

Itulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya wakaf dalam syari'at Islam.

Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT. melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain (umum/masyarakat).

## 5. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

Unsur-unsur wakaf (*rukun-rukun wakaf*) ada empat, yaitu:

- a. Orang-orang berwakaf (*Wakif*);
- b. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (*Mauquf*);
- c. Tempat berwakaf (*Mauquf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu; dan

---

<sup>51</sup> Asy-Syaukani Muhammad bin Ali Muhammad, *Nailul Authar*, (Mesir 1374 H), h.127

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Kuwait: Darul Bayan, 1971), h. 378.

<sup>53</sup> Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar fi Haili Ghoyatil Ikhtisor*, Ahmad bin Said Nabham, (Surabaya: t.t), h. 319



pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya<sup>54</sup>

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) berakal sehat, (2) telah dewasa, (3) dapat dipercaya, dan (4) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain<sup>55</sup>

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf, sebab apabila nadzir dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. AL Maarif, 1987), h. 19

<sup>55</sup> Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: 1985), h.28.

و أحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف  
الخيرى

Macam-macam wakaf :

- a. Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zurri (keluarga).
- b. Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan)."

وقف اهلي  
وقف ذري  
وقف خيرى

Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk: 1) Wakaf Ahli/Wakaf zurri 2) Wakaf Khairi.

Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad. Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

... قد سمعت ما قلت فيها, وأني أرى أن تجعلها في  
الأقربين, فقسّمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه.



Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan/memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan/kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

Tentang berbagai jenis penggunaan wakaf khairi yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai Negara Islam, <sup>60</sup> menulis sebagai berikut :

“... beberapa macam wakaf yang masih didapatkan dalam masyarakat Islam sampai kini, yakni wakaf yang ditujukan untuk memberikan perbelanjaan buat:

1. Masjid-masjid.
2. Sekolah-sekolah.
3. Perpustakaan umum.
4. Rumah sakit.
5. Penginapan orang musafir.
6. Rumah-rumah miskin.
7. Air minum untuk umum.
8. Persiapan senjata, kendaraan buat perang.
9. Persiapan perlengkapan pejuang-pejuang.
10. Asrama-asrama buat Mujahidin.

---

<sup>60</sup> Musthafa Asy-Syiba'I, *Al-Istirokiyah Al Islamiyah*, alih Bahasa Malik Ahmad, (Jakarta: Mulia, 1964), h.150-153.

dia atau keluarganya tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai ongkos perkawinan.

28. Wakaf guci tempat air susu.
29. Wakaf air susu.
30. Wakaf untuk ternak.
31. Wakaf untuk menyantuni hewan.”<sup>61</sup>

## **8. Kedudukan Dan Perubahan Wakaf**

### **a. Kedudukan Wakaf**

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud dengan shodaqoh jariyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah r.a. – menurut para ulama<sup>62</sup> adalah wakaf. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam shodaqoh.

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf.

Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf<sup>63</sup>. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan

---

61

<sup>62</sup> Lihat, Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, t.t. : 87; Asy-Syaukani, 1374 : 127; Sayid Sabiq, 1971 : 378; Imam Taqiyuddin Abi Bakar, t.t. : 319)

<sup>63</sup> Lihat, Imam Suhadi, 1985 : 27 : 28; Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 16



Kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah perubahan benda wakaf tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik.

Alasan mereka adalah hadits Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya<sup>66</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf, atau menukarnya, menggantinya,

---

<sup>66</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93.

piatu, dan kemudian ada keperluan lain yang mendesak terhadap tanah itu diperlukan bagi keperluan yang disebut terakhir.

Mengenai perubahan penjualan atau penukaran benda wakaf, Ahmad azhar basyir<sup>68</sup> mengutipkan:

“Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang wakaf Umar, harta wakaf tidak boleh dijual, diwaris atau dihibahkan. Yang menjadi soal, bila harta-wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta-wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual, dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali?”

Berbeda halnya dengan segi-segi ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta-benda, amalan wakaf amanat bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuan. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk

---

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. AL Maarif, 1987), h.17-19



dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

**Kedua:** Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Ahmad berdalil bahwa Umar bin Khaththab r.a. memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Utsman r.a. pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Demikian pula Masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua hadis shahih, bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada Aisyah:

لو ان قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها  
بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه و بابا يخرج منه  
الناس.

Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah ka'bah itu akan runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk randah, serta aku jadikan

mesjid itu menyetujuinya; maka hal itupun dapat dilakukannya.

Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang menggantikan mesjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat AsySyafi'I dan lain-lain. Tetapi nash-nash, atsar-atsar dan kiyas menghendaki

Demikian wakaf tersebut boleh dijual, dipindahkan, dirobah atau diganti untuk kemudian diatur kembali pemanfaatannya bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan wakaf. Yang menjadi landasan utama dari kebolehan tersebut ialah agar benda itu tetap memberikan kemashlahatan bagi umat manusia sepanjang yang dibolehkan agama. Fiqh islam mengenai prinsip "*mashlahah*" (memelihara maksud syara', yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan, daripada harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah<sup>70</sup>

## **B. Wakaf menurut KHI**

### **1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Penyusun kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang merupakan proyek pembangunan Hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan komplikasi tersebut disusun oleh Tim yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1987), h.18.



### C. Wakaf Sebagai Fungsi Sosial

Dalam pandangan hukum islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup, termasuk kita sekalian, adalah kepunyaan Allah SWT. Hal ini seperti disebutkan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

“ Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).” (QS. Yunus [10] :55)

Islam memulai pandangannya terhadap sesuatu soal sebagaimana biasanya ialah dengan meninjau soal itu dari segi tujuannya: jama'ah. Mereka yang mempelajari syari'at islam secara mendalam dapat mengerti bahwa jika di luar bidang peribadatan dikatakan suatu hak adalah hak Allah, maka yang dimaksud ialah hak jama'ah atau hak umum.<sup>71</sup>

Manusia sebagai makhluk Allah SWT. Yang diberi jiwa akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Mereka dikaruniai harta milik allah sebagai amanat yang harus dipeliharanya. Harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk-Nya. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

---

<sup>71</sup> Ahmad Yamani, *Asy Syari'atul Kholidat Wa Musykilatul Ashr*, Alih Bahasa KMS, Agustjik, (Jakarta: Lembaga studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977), h. 44.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى  
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al Baqarah [2] : 29)

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Menjelaskan, bahwa segala apa yang ada di atas bumi, dalam perut bumi dan segala apa yang ada di ala mini, telah dijadikan Allah SWT. untuk kepentingan umat manusia seluruhnya. Tiap-tiap orang dengan tidak terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta benda dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya, baik bagi dirinya maupun keluarganya, dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh penciptanya dan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh-Nya.

Cara memperoleh harta benda, Allah SWT. Telah memberikan ketentuan, yaitu harus melalui usaha yang halal, artinya dibenarkan oleh hukum dan tidak merugikan orang lain. Beberapa ayat A-Qur'an yang berkaitan dengan cara memperoleh harta benda antara lain:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ  
وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ



harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah [2] : 188).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al Baqarah [2] : 219)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An Nisa [4] : 7 )

apa yang dikehendaki-nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu (Q.S., 5 : 17).

b. Firman Allah dalam surat Al-isra ayat 111:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا

“Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan mempunyai sesuatu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong (untuk menjaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.”(Q.S., 17 : 111).

c. Firman Allah dalam surat Al-hadid ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(Q.S., 57 : 7).

d. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ قَالَ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ



menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) sisa yang pedih.” (Q.S., 9 : 34).

g. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ  
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ  
الْمُحْسِنِينَ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari pada kamulah yang dapat mencapainya. Dan Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S., 22 : 37).

h. Hadis Rasulullah s.a.w :

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذی)

“Sesungguhnya atas harta benda kekayaan ada kewajiban selain zakat.” (H.R. Turmudzi).

i. Dalam islam di kenal dalam hak menghormati kepentingan orang lain yang bertetangga tanah. Selanjutnya dapat kita baca dalam sejarah pada masa sahabat Umar r.a., yaitu peristiwa Adh-Dhohak lawan Muhammad bin Maslamah. Adh-Dhohak bermaksud mengalirkan air melewati tanah Muhammad bin Maslamah. Tapi Muhammad bin Maslamah menolak untuk memberikan izin kepada Adh-Dhohak. Kemudian masalah ini diadukan kepada Khalifah Umar r.a. setelah mendengar pengaduan

2. Untuk adanya kepastian hukum dalam masyarakat sebagai jaminan bagi adanya kedamaian dalam hidup bersama, maka hak milik seseorang (individu) atas suatu benda, diakui dengan pengertian, bahwa:

- a. Hak milik harus di dapati secara halal.
- b. Hak milik tersebut harus bergungsi sosial.

Jadi hukum islam tidak memperhatikan pembatasan-pembatasan hak milik dari segi jumlahnya, melainkan dari segi cara mendapatkannya (halalnya) dan fungsi (sosial)-nya dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka dalam hak-hak milik, agama islam sedikit mengandung pengertian-pengertian yuridis yang tidak mungkin masyarakat menjurus kepada sistem ekonomi yang riberal kapitalis atau yang komunistis. Ia bahkan memberikan dasar bagi perumusan-perumusan yuridis untuk menciptakan sistem kemakmuran bersama yang menilai tinggi martabat manusia (individu).<sup>77</sup>

Salah satu lembaga keagamaan yang erat kaitanya dengan upaya pencapaian kemakmuran bersama adalah wakaf. Melalui wakaf seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dinikmati oleh orang lain. Hal ini disebabkan pada dasarnya setiap orang berhak untuk menikmati seluruh harta yang di karuniakan Allah SWT. Kepada umat manusia, melalui cara yang di tentukan oleh-nya.

---

<sup>77</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.149-150.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Farid, *Mu'jam Al-Mufharas Li Al-Faz Al-Qura'an*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1987.
- Abdurrahman, *Masalah Pewakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung : Alumni, 1979.
- Ahmad, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977.
- Al Sais, Ali, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Bagian Ketiga, Dar- Al Fikr, Beirut, t.t.
- Ali, Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi dan Wakaf*, Bandung : Alumni 1977.
- Alinea Kedua Penjelasan Umum PP No. 28 Tahun 1977
- Al-Khalani, *Subul al-Salam*, jilid II, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t.
- Asaf AA Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law*, disalin oleh Arifien Bey, Jakarta: Tintamas, 1966.
- Ash Siddiqi, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta, Bulan bintang, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970 .
- Asy-Syiba'I, Musthafa, *Al-Istirokiyah Al Islamiyah*, alih Bahasa Malik Ahmad, Jakarta: Mulia, 1964.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. AL Maarif, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al Maarif, 1987.

Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982.

Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Ismail Al-Kahlani, Imam Muhammad, *Subulus Salam*, Bandung: Dahlan t.t

Khudari Bek, Syeh Muhammad, dan Ahmad zaki Yamani, 1977.

Maulana, Ali Muhammad, *The Relegion Of Islam, Terjemhan R. Kaelan dan HM Bachrum*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru 1980.

Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'I t.t

Muhammad Zakaria Al-bardisi, 1964

Muhammad, Asy-Syaukani bin Ali Muhammad, *Nailul Authar*, Mesir 1374 H.

Qardawi, Yusuf, *al-'ibadah fi al-islam*, Muassasah al-Risalah, Mesir, 1979.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, Beirut, Dar Al-Fikri.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, I, al-Syifa', Semarang, cet.I. 1990.



Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, Beirut, Dar Al-Fikri, Cet, IV, 1983.

Shihab, Quraish, *Filsafah Ibadah dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Putra, Jakarta, 1992.

Sihab, Quraish dan Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshari Umar, Pustaka Dian, Jakarta.

Sihab, Quraish, *Filsafah Ibadah Dalam Islam* dalam buku Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bumi aksara, 1992.

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: 1985.

Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang Angkasa Raya. t.t

Tafsir Ibnu Katsir Juz I : 381; Fiqhussunnah Jilid III : 381; Fiqh Islam Sulaiman Rasyid : 324; Subulussalam : 87; Laporan Hasil Penelitian Wakaf IAIN Syahida Jakarta : 132.

Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar fi Haili Ghoyatil Ikhtisor*, Ahmad bin Said Nabham, Surabaya: t.t.

Ter Haar, *Beginnselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, (Jakarta : Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, 1968.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, darul Ulum Press, Kudus, 1994.

Wahbah Al-Zahili, *Al Fiqh al Islamy Wa Abdillatuhu*, Daar El Fikr, Damsyiq, 1989.

Yamani Zaki, Ahmad, Dr. Asy-Syari'atul Kholidat Wa Musykilatul Ashr, Alih Bahasa KMS. Agustjik, *Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika* Jakarta, 1977.



## BIODATA PENULIS



H. Khoirul Abror, lahir di Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus, Lampung, Tanggal 03 April 1957 yang sekarang ber-domisili di Bandar Lampung.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Putihdoh Tahun 1970, pendidikan dilanjutkan pada Pondok Pesantren YMPI (Yayasan Majelis Pelajar Islam) dan memperoleh ijazah pondok (swasta); setelah terhenti selama 3 tahun, pada tahun 1976 memperoleh ijazah Tsanawiyah Negeri melalui ujian persamaan. Kemudian melanjutkan ke Madrasah 'Aliyah Negeri (Ex. SP.IAIN) memperoleh ijazah Negeri Tahun 1979.

Pada tahun 1979 itu juga menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dan memperoleh ijazah Sarjana Muda (BA). Tahun 1983, melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sama di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dan memperoleh ijazah Doktorandus (Drs) Tahun 1986. Menyelesaikan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung (UNILA) tahun 2003. program Doktor Prodi Hukum Keluarga.

Aktivitas dibidang pendidikan dimulai sebagai Asisten Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung sejak Tahun 1984-1987; Pada tahun 1988 diangkat sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi yang sama dalam mata kuliah Fiqh Ibadah sampai sekarang dengan pangkat Pembina/ Lektor Kepala (IV/c).

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: "Sebab-sebab Hapusnya Hukuman menurut KUHP dan Hukum Islam" (Skripsi Sarjana Muda); "Recidive Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi Sarjana). "Perkawinan antar Agama"



(Penelitian Kolektif); "Klinik Tradisional dalam Upaya Menghimpun Tenaga kerja Wanita", Studi Kasus pada Panti Pijat di Sepanjang Jalan Yos Sudarso Kecamatan Teluk Betung Selatan (Penelitian Individu) yang diterbitkan oleh seksi penerbitan Fakultas Syari'ah. "Problematisa Pengelolaan Janazah Tanpa Identitas", Studi di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek (Penelitian Individu) tahun 2002 dengan ISBN: 979-3161-01-9; dan juga "Buku Fiqh Ibadah" (Edisi Revisi) yang sedang ditangan saudara ini, dengan ISBN 979-3161-01-0. "Antisipasi dan Solusi kekerasan Massa, studi di wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung" (Penelitian Individu Tahun 2003 ISBN No. 979-3161-42-6; "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan" (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang) Penelitian individu (Tesis S2) tahun 2003. "Buku Dakwah Pembangunan" ISBN No. 979-3161-40-3. Dan buku ajar "Fiqh Munakahat", yang diterbitkan oleh seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, tahun 2009. "Terobosan bagi Pondok Pesantren dalam upaya Pengelolaan BMT dan Balai Usaha Latihan Keterampilan", makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Workshop yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung di Hotel Kurnia 2; "Jenazah Anonim dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Perawatan Jenazah di RSUD Abdoel Moeloek), Penelitian individu (Tahun 2014), ISBN 978-602-717-081-0; "Hukum Keluarga Islam di Afganistan (Menyingkap Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam" (ISBN: 978-602-9326-56-7); Hasil Penelitian atau Pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Monograf, dalam Buku (Editor): SK. No. In.09/LP2M/ TL.01/ Buku.03.a/ 2013 Tanggal : 15 April 2013 ; "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia dan Negara-negara Muslim, (hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi, Kep Dirjen Dikti kemendiknas RI no. 040/2014 al'adalah Vol XII hal 235-464, Desember 2014, ISSN : 0854-1272; Perkawinan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian Individu Tahun 2015 yang dibiayai dari dana DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2015, ISBN : N978-602-691-017-2; Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah



Tangga, Penelitian Individu tahun 2016 yang dibiayai dari dana DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016; Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat, Dampak dan Solusinya di Lampung, (program Doktor), Buku **Fiqh Ibadah** (Edisi Revisi), tahun 2017 dengan ISBN 978-602-6541-49-9; dan juga Buku Ajar **Hukum Perkawinan dan Perceraian** (tahun 2017) yang diterbitkan oleh Penerbit LADANGKATA Yogyakarta ISBN 978-602-6541-50-5;

Juga sering membuat artikel di media cetak; Koran dan majalah ilmiah lain yang telah terakreditasi.



